

**PERAN BABINSA KODIM 0204/DS DESA RANTAU PANJANG  
MENGURANGI NARKOBA DI DESA RANTAU PANJANG  
KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**TESIS**

**OLEH**

**MUHSIN  
NPM. 181801001**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

## ABSTRAK

### PERAN BABINSA KODIM 0204/DS DESA RANTAU PANJANG MENGURANGI NARKOBA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG

**Nama** : Muhsin  
**NPM** : 181801001  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Peran Babinsa dalam mengurangi narkoba saat ini masih rendah, keadaan tersebut terlihat dari tingginya peredaran narkoba di Desa Rantau Panjang dalam kurun waktu 2017-2018, dimana terjadi beberapa kali penangkapan warga Desa Rantau Panjang oleh pihak Kepolisian dan BNNK Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana peran Babinsa Kodim 0204/DS Desa Rantau Panjang mengurangi Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. 2) Menganalisa Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Babinsa 0204/DS Desa Rantau Panjang dalam mengurangi Narkoba di desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisa data secara induktif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Babinsa 0204/DS Desa Rantau Panjang dalam mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang dapat dikatakan berhasil hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan Kodim 0204/DS untuk meningkatkan kemampuan para Babinsa khususnya dalam mengurangi peredaran Narkoba di wilayah Kodim 0204/DS khususnya Babinsa Desa Rantau Panjang dapat melaksanakan tugas dan dapat bekerjasama dengan aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Babinkantibmas untuk bersama-sama mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari: 1) Berkurangnya penangkapan Bandar dan pengguna Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu tahun 2019. 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi peredaran Narkoba di desa Rantau Panjang dengan melapor kepada babinsa, Kepala Desa dan Babinkantibmas bila ada warga Desa Rantau Panjang maupun warga dari luar Rantau Panjang yang bertransaksi Narkoba di Desa Rantau Panjang. Disarankan untuk mengurangi Narkoba di desa-desa peningkatan kemampuan Babinsa harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan khususnya komunikasi sosial Babinsa dengan masyarakat di wilayah desa binaanya, selain itu sangat penting meningkatkan kerja sama dengan BNN, Kepolisian dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian untuk menyelamatkan generasi bangsa dari Narkoba.

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF BABINSA KODIM 0204 /DS RANTAU PANJANG VILLAGE REDUCES DRUGS IN RANTAU PANJANG VILLAGE SUB-DISTRICT PANTAI LABU DELI SERDANG REGENCY**

**Nama** : **Muhsin**  
**NPM** : **181801001**  
**Study Program** : **Master of Science Public Administration**  
**Supervisor I** : **Dr. Heri Kusmanto, MA**  
**Supervisor II** : **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

*Babinsa's role in reducing drugs is currently still low, this situation can be seen from the high drug trafficking in Rantau Panjang Village in the 2017-2018 periode, where there were several arrests of residents of Rantau Panjang by the Police and BNNK of Deli Serdang Regency. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the role of Babinsa Kodim 0204/DS Rantau Panjang Village in reducing drugs in Rantau Panjang Village, Pantai Labu District, Deli Serdang Regency. 2) Analyze the supporting and inhibiting factors for the role of Babinsa 0204/DS Rantau Panjang Village in reducing drugs in Rantau Panjang Village, Pantai Labu District, Deli Serdang Regency. The method used in this research is a qualitative method with inductive data analysis. The results of this study indicate that the role of Babinsa 0204/DS Desa Rantau Panjang in reducing drug trafficking in Rantau Panjang village can be said to be successful because of the efforts made by Kodim 0204/DS to improve the ability of Babinsa, especially in reducing drug trafficking in the region. Kodim 0204/DS especially Babinsa Rantau Panjang village can carry out their duties and can cooperate with village head, community leaders, religious leaders, youth leaders and Babinkantibmas to jointly reduce the circulation of drugs in Rantau Panjang Village, Pantai Labu District, Deli Serdang Regency. The success indicators can be seen from: 1) Reduced arrests of drug agency and drug users in Rantau Panjang Village, Pantai Labu Sub-District in 2019. 2) Increased public awareness to reduce drug trafficking in Rantau Panjang village by reporting to Babinsa, Village head and Babinkantibmas if there are residents Rantau Panjang Village and residents from outside Rantau Panjang who transact drugs in Rantau Panjang Village. It is suggested to reduce drugs in villages, increasing the capacity of Babinsa should be a priority to be improved, especially Babinsa social communication with the community in the village under its guidance, besides that it is very important to increase cooperation with the National Narcotics Agency, the Police and other concerned parties to save the nation's generation from drugs*

**Keywords: Role, Babinsa, Drugs**

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Peranan .....	9
2.2. Pengertian Babinsa .....	16
2.2.1. Kemampuan yang harus dimiliki babinsa.....	18
2.2.2. Faktor faktor yang mempengaruhi.....	21
2.2.3. Pembinaan Teritorial.....	22
2.2.4. Kerangka berfikir.....	32
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.2. Bentuk Penelitian .....	34
3.3. Informan Penelitian.....	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5. Teknik Analisa Data .....	38
3.6. Definisi Operasional .....	40
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	41
4.1.1. Gambaran Umum Desa Rantau Panjang .....	41
4.1.2. Gambaran Umum Kodim 0204/DS.....	49
4.1.3. Struktur Organisasi Kodim 0204/DS.....	64
4.1.4. Struktur Organisasi Koramil Berdasarkan Eselon .....	72
4.2. Peran Babinsa Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba.....	76
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Babinsa Dalam Mengurangi Peredaran Narkoba.....	83

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	88
5.2. Saran .....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
-----------------------	-----------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 memuat tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang khususnya pada pasal 7 ayat (2) point (9) yaitu membantu tugas pemerintah daerah. Maksud membantu tugas pemerintah daerah yaitu membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi seperti membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa tahun 2015 adalah “**tahun konsolidasi**” dimana TNI AD disamping melaksanakan tugas pokoknya juga telah dilibatkan dalam upaya menyukseskan agenda politik nasional yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Terhadap agenda nasional tersebut TNI AD telah membuktikan netralitasnya dengan sangat baik. Untuk itu secara organisasi sangat penting bagi TNI AD melaksanakan konsolidasi secara menyeluruh.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

Konsolidasi tersebut dijabarkan dalam bentuk Pembinaan Satuan (internal) dan Serbuan Teritorial (eksternal). Serbuan teritorial adalah kegiatan pembinaan teritorial secara serempak, cepat, serius, ikhlas serta terkoordinasi dengan baik disemua lini kehidupan masyarakat serta manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat bukan semata-mata seremonial belaka.

Kodim sebagai satuan kewilayahan yang melaksanakan pembinaan teritorial diwilayahnya mengimplementasikan serbuan teritorial tersebut dalam berbagai kegiatan positif seperti pelatihan bela negara bagi warga negara, pemanfaatan lahan tidur disatukan untuk dijadikan lahan pertanian/peternakan, melaksanakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat, membantu pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian padi, jagung dan kedelai dan yang paling fenomenal adalah membantu pemerintah mewujudkan Indonesia bersih Narkoba karena saat ini Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba. Mewujudkan Indonesia Indonesia yang bersih Narkoba bukanlah rencana dan pekerjaan yang ringan, semudah membalikkan telapak tangan namun memerlukan keseriusan dan keikhlasan dalam menjalankannya. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba didunia berimbas ke Indonesia. Perkembangannya sangat pesat karena hal ini membawa efek yang buruk terhadap masyarakat (cnnindonesia.com, 2015). Karena kekhawatirannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pidatonya pada tanggal 20 Januari 2015 di Pontianak menyampaikan bahwa Indonesia sedang berada dalam status “**darurat narkoba**” sehingga menurutnya tidak ada maaf bagi pelaku narkoba khususnya di Indonesia. Jokowi juga menyampaikan bahwa dampak negatif narkoba tidak hanya merasuk ke

lingkungan anak-anak muda, tetapi juga institusi-institusi yang ada di Indonesia (Regional.kompas.com, 2015). Begitu besar kerusakan yang diakibatkan oleh narkoba sehingga pada tanggal 13 Mei 2015, TNI menandatangani MOU kerjasama dengan BNN pusat untuk membantu memerangi narkoba ditengah masyarakat yang di tangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko mewakili pihak TNI dan Komjen Pol Anang Iskandar mewakili dari pihak BNN Pusat di Mabes TNI Cilangkap. MOU berisi Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka pencegahan, pemberantasan, peredaran narkotika dan pemberian bantuan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba dengan menyediakan sarana dan prasarana TNI sebagai tempat Rehabilitasi Narkoba dan juga bersama BNN melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat.

Berdasarkan data yang di ambil dari pihak TNI bahwa saat ini, TNI sedang gencar-gencarnya membantu pemerintah mengurangi peredaran Narkoba baik di lingkungan TNI maupun terhadap masyarakat, di Internal TNI sudah terprogram pengecekan secara berkala berupa program P4GN ( Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), yang mana seluruh matra TNI secara rutin melaksanakan program P4GN bila terbukti personel TNI kedapatan pengguna ataupun pengedar Narkoba maka oknum prajurit tersebut segera diproses hukum dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas kemeliteran. Sedangkan kegiatan TNI membantu pemerintah mengurangi peredaran Narkoba di masyarakat di buktikan dengan aktifnya para Komandan Satuan di lingkungan TNI membantu pemerintah dan BNN memberantas Narkoba seperti yang di

nyampaikan Brigjen TNI Alfred Denny Tujeh ia mengatakan “ Bahwa personel

Angkatan Darat melaksanakan razia bersama personel Polri di tempat yang dicurigai memproduksi narkoba serta tempat rawan peredaran narkoba selain razia personel TNI AD juga berhasil menggagalkan penyeludupan 16 kg daun ganja yg dilakukan personel Kodim 0321/Rokan Hilir dan berhasil menggagalkan transaksi sabu seberat 1 kg yang dilakukan oleh personel Kodim Berau".Detik News 27/02/2018. Selain personel Angkatan Darat Personel Angkatan laut juga berhasil melakukan penangkapan Sabu seberat 79 kg yang di seludupkan dari Malaysia ke Sumatera Selatan oleh Lanal Palembang pada tanggal 29/10/2019.detik news, begitu juga penangkapan sabu seberat 1 ton oleh Lanal Batam dari kapal motor MV Sunrise Glory di perairan Selat Philips perbatasan Indonesia dengan Singapura atau sekitar perairan Batam pada tanggal 7/2/2018 oke zone. Pengamat militer dan Intelijen Susaningtita NH Kertopati mengomentari penangkapan sabu seberat 1 ton oleh Lanal Batam dari kapal motor MV Sunrise Glory ia mengatakan "Sinergi TNI dan Polri dalam memberantas Narkoba harus bisa menjadi faktor penggentar pelaku tindak pidana Narkoba sehingga mereka takut dan menjadi model yang patut di contoh negara lain".Maritim news com. Begitu juga yang dilakukan oleh Pemko Bandung yang melaksanakan kegiatan Optimalisasi peran TNI dan Polri dalam P4GN untuk mewujudkan kelurahan yang bersih Narkoba dimana pesertanya adalah Danramil, Babinsa,Kapolsek,Babinkantibmas dan BNN dalam Amanat nya Wali Kota Bandung menyampaikan "saya berharap acara ini bukan hanya sekedar penyampaian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, tetapi lebih dari itu,melalui acara ini peserta kegiatan yaitu TNI/Polri mampu membangun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

semangat anti Narkoba dan kepedulian bersama berperan serta memerangi bahaya Narkoba". Pikiran Rakyat Com 18/08/2019.

Dari data yang ada menunjukkan upaya TNI sudah ada untuk membantu pemerintah, BNN dan kepolisian untuk memberantas peredaran Narkoba, khususnya satuan Teritorial walaupun hasilnya belum maksimal dikarenakan terbatasnya sarana-dan prasarana serta pengetahuan yang dimiliki aparat teritorial yang ada di satuan-satuan teritorial yang berhubungan dengan Narkoba. Selanjutnya menindak lanjuti kerjasama yang telah dilakukan Panglima TNI dan BNN Pusat dalam upaya memberantas Narkoba, maka Kodim 0204/DS melaksanakan MOU dengan BNNK Deli Serdang dalam membantu BNNK Deli Serdang memberantas peredaran Narkoba di wilayah kabupaten Deli Serdang dengan di tandatanganinya MOU kerjasama pada tanggal 28 Januari 2019 di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli oleh Bupati Deli Serdang Bapak Ashari Tambunan kepala BNNK Deli Serdang AKBP Safwan Khayat dan Dandim 0204/DS Letkol Kav Syamsul Arifin dengan mendeklarasikan Desa bersih Narkoba (Bersinar) yang di resmikan oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI Sabrar Fadillah, Kepala BNNP Sumut Bapak Marsauli Siregar SH dan Bupati Deli Serdang Bapak Ashari Tambunan dengan tujuan memaksimalkan peran Babinsa Kodim 0204/DS untuk membantu pemerintahan desa dalam mengurangi peredaran Narkoba di wilayah pedesaan di Kabupaten Deli Serdang. Terpilihnya Desa Rantau Panjang di jadikan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Terjadi penangkapan pelaku Narkoba sepanjang 2017-2018 sebanyak 8 kali yang pelakunya semua warga Desa Rantau Panjang.
2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Narkoba sehingga sebagian besar masyarakat tidak tahu bahaya Narkoba dan terkesan tidak peduli bahaya yang ditimbulkan narkoba.
3. Desa ini ini memiliki garis pantai yang cukup luas dan memiliki pelabuhan–pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus tempat masuknya narkoba yang datang dari Malaysia dan ini menjadi sorotan serius pihak BNNK Deli Serdang karena bandar maupun penyeludup narkoba secara aktif melakukan kegiatannya di kawasan ini dan jarang tersentuh aparat penegak hukum
4. Setelah dicanangkan menjadi Desa Bersinar oleh Pangdam I/BB,Kepala BNN Sumut dan Bupati Deli Serdang adakah peran babinsa di dalam mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti atau mengangkat masalah tersebut di dalam penelitian ini karena permasalahan Desa adalah permasalahan Babinsa dimana Babinsa harus membantu kepala Desa,Babinkantibmas,tokoh masyarakat dan seluruh komponen yang ada di Desa Rantau Panjang dalam menanggulangi permasalahan Narkoba . Adapun judul penelitian ini adalah “Peran Babinsa Desa Rantau Panjang Kodim 0204/DS dalam mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang Kec. Pantai Labu Kab Deli Serdang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Babinsa sebagai ujung tombak terdepan satuan Teritorial mengurangi peredaran narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Babinsa dalam upaya mengurangi peredaran narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tahun 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan tersebut di atas, maka *pentingnya* penulisan Tesis ini bertujuan

1. Menganalisa peran Babinsa dalam mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai labu Kabupaten Deli Serdang.
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Babinsa dalam upaya menangani peredaran narkobadi Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tahun 2019.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini kirannya dapat membawa manfaat,

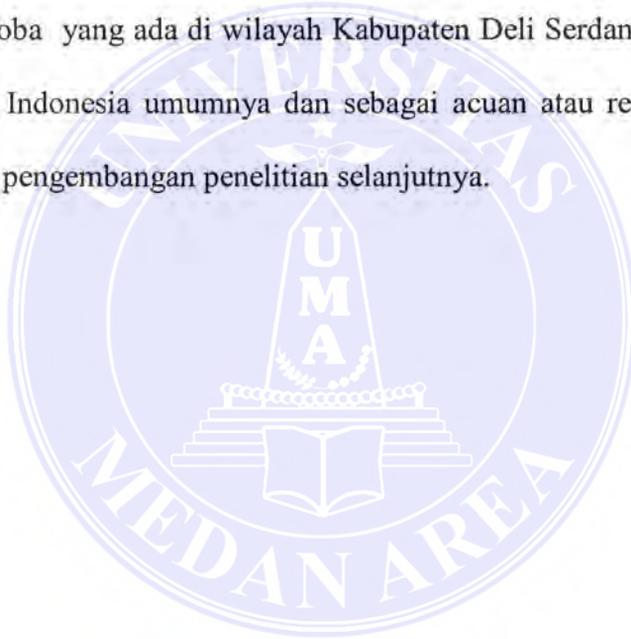
secara umum ada 2 (dua) hal yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu :

## 1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya ilmu Administrasi Publik terutama dalam manajemen publik.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pimpinan TNI dalam upaya membantu pemerintah Daerah dan BNN dalam penanggulangan bahaya Narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang khususnya dan wilayah Indonesia umumnya dan sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Dwi Narwoko, 2004:138).

Menurut Paul B. Horton dan Chester (2009:118) peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam peran, selalu dikaitkan dengan posisi (*position*). Posisi akan menunjukkan bagaimana status atau kedudukan seseorang individu atau kelompok dalam sosial masyarakat, dan akan menentukan tingkah laku atau tindakan individu atau kelompok.

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan (Soekanto, 2006:243).

Menurut Narwoko dan Suyanto (2007:158) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat, sedangkan peran lebih banyak menunjuk fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Menurut Narwoko dan Suyanto (2007:159) suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Narwoko dan Bagong Suyanto (2007:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan bermasyarakat.

Selain itu Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peran didefinisikan dari masing-masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai arti peran penting dalam mengatur perilaku bawahan menurut Veithzal Rivai (2006:148).

Peranan adalah sebagai berikut : Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep peranan sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2002:243) :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau sasaran
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat

Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya, serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:667) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Kemudian menurut Gunawan (2003:369) peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Narwoko, 2004:140).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) : yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi :

1. Peranan bawaan (*ascribed roles*): yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, kepala desa dan sebagainya.

2. Peranan Pilihan (*achives roles*): yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk menjadi prajurit TNI

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka setiap individu Babinsa harus menjalankan tugas sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisinya di Desa, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan untuk membimbing dan membantu dalam proses pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik termasuk membantu pemerintah desa rantau panjang dalam penanganan masalah narkoba yang marak di desa rantau panjang. Dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh Babinsa maka akan tercipta suatu hubungan yang baik antara Babinsa dengan masyarakat desa binaannya. Menurut Soekanto (2004:243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut

## 2.2 Pengertian Babinsa

Babinsa Singkatan dari Bintara Pembina Desa yang mempunyai arti personel yang menduduki suatu jabatan salah satu kekuatan Kodam (Komando Daerah Militer) yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resort Militer (Korem) yang bertugas sebagai penyambung lidah berkoordinasi dengan aparat terkait di Desa/ Kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Babinsa adalah pelaksana Danramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang Hankam dan Pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di Pedesaan. Babinsa adalah pelaksana Dan Ramil dalam pelaksanaan BINTER yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan serta penyelenggaraan pembinaan wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi serta

kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan Hankam Negara. Di era reformasi sekarang ini, kemampuan Babinsa sangat menentukan keberhasilan pembinaan teritorial sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Babinsa selalu berkoordinasi dengan aparat terkait di Desa/ Kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya.

Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Babinsa sering disibukkan dengan berbagai macam masalah yang menyangkut sosial (kemasyarakatan), disamping kemampuan yang dimiliki para Babinsa, para Babinsa masih perlu diberikan tuntutan, pendidikan khusus bidang teritorial, maupun penataran-penataran dan lain sebagainya. Agar mereka dapat melaksanakan tugas kegiatan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas Babinsa melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melatih satuan perlawanan rakyat.
2. Memimpin perlawanan rakyat di pedesaan.
3. Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara.
4. Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang Hankamneg.
5. Melakukan pengawasan fasilitas/prasarana Hankam di pedesaan/kelurahan.
6. Memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala

### 2.2.1. Kemampuan yang harus di miliki Babinsa

Kemampuan yang diprasyaratkan guna mendukung tugas babinsa yang agar pelaksanaan pembinaan teritorial yang dilakukan babinsa dapat berhasil sebagai berikut :

1. Kemampuan temu cepat lapor Cepat.
2. Kemampuan Penguasaan wilayah.
3. Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat.
4. Kemampuan menejemen Teritorial.
5. Kemampuan Komunikasi Sosial.

1. Kemampuan temu cepat lapor cepat.

Kemampuan temu cepat lapor cepat merupakan kemampuan untuk memperoleh keterangan secara cepat (deteksi dini) dan melaporkan dengan tepat, sehingga dapat ditindak lanjuti untuk di jadikan bahan keterangan dalam rangka cegah dini. Kegiatan yang diselenggarakan dapat dilaksanakan langsung oleh babinsa atau secara tidak langsung menggunakan mitra karib sebagai mitra kerja babinsa di wilayah tugas tanggung jawabnya. Dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

## 2. Kemampuan menejemen Teritorial.

Kemampuan menejemen teritorial merupakan kemampuan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatalaksanaan binter, sehingga diharapkan setiap babinsa memiliki pola pikir dan pola tindak serta landasan berpikir yang sama dalam melaksanakan penyelenggaraan binter di wilayah tanggung jawabnya, dengan pentahapan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data teritorial. Memuat tentang rencana waktu kegiatan, rencana kegiatan pengumpulan data teritorial, membuat rencana pengarsipan dan rencana laporan data teritorial.
- b. Analisa kejadian. Analisa kejadian merupakan kegiatan penganalisaan data –data kejadian yang ada pada tabulasi data teritorial untuk menentukan pengklasifikasian wilayah dan sasaran-sasaran kegiatan binter babinsa.
- c. Menyusun rencana kegiatan binter. Menyusun rencana kegiatan binter merupakan kelanjutan dari analisa kejadian untuk mengakomodir seluruh sasaran-sasaran yang telah ditentukan sehingga seluruh sasaran dapat terwadahi dalam rencana kegiatan binter.
- d. Pembuatan laporan binter. Pembuatan laporan binter meliputi laporan kegiatan binter yang dilaksanakan secara berkala baik harian,mingguan,bulanan dan triwulan.

### 3. Kemampuan penguasaan wilayah.

Kemampuan penguasaan wilayah merupakan kemampuan untuk mengenal secara mendalam ciri-ciri potensi SDA, SDB dan SDM serta sarana dan prasarana daerah, sehingga dapat mengantisipasi hakekat ancaman yang mungkin timbul dan pencegahannya serta merumuskan langkah pencegahan dan penangkalannya. Hal yang perlu mendapat penekanan pada kemampuan penguasaan wilayah adalah mendata sumber daya alam dan sumber daya buatan, mendata sumber daya manusia dan mendata sarana dan prasarana yang ada di wilayah binaan.

### 4. Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat.

Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat merupakan kemampuan membina masyarakat agar memiliki sikap mental, motivasi, tekad dan semangat juang yang kuat dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang timbul dilingkungan masyarakat.

### 5. Kemampuan Komunikasi sosial.

Kemampuan Komunikasi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki babinsa dalam berkomunikasi dengan komunikan (orang perorang) yang ada dalam masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan orang perorang dalam masyarakat maupun aparat pemerintah untuk berpartisipasi

pada kepentingan bidang pertahanan dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah.

### 2.2.2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Komsos babinsa antara lain:

#### a. Dari dalam.

- 1) Personel. Tingkat kemampuan Babinsa dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Komsos secara optimal.
- 2) Sarana dan prasarana. Kesiapan sarana dan prasarana akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Komsos, agar tidak menghambat dalam pelaksanaannya.

#### b. Dari luar.

- 1) Mempertimbangkan strata pendidikan dan jabatan.
- 2) Adat istiadat atau budaya masyarakat yang ada di desa binaan.
- 3) Pola sikap dan pola tindak masyarakat yang ada di desa binaan.
- 4) Perkembangan lingkungan .
- 5) Perundang-undangan yang terkait dengan Otonomi Daerah (Otda) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

### 2.2.3 Pembinaan Teritorial

Pembinaan teritorial atau yang sering di sebut binter adalah penggunaan kekuatan matra darat yang dilakukan dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya untuk menjadikan kekuatan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dalam bentuk ketahanan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara di darat.

Sikap teritorial adalah wujud nyata pengamalan dan penghayatan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam bentuk keseluruhan tingkah laku, tindak tanduk dan cara seorang prajurit dalam berhubungan dengan segenap lapisan masyarakat untuk mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Pembinaan Teritorial TNI AD diarahkan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan potensi nasional melalui Pembinaan Kemampuan Teritorial, Perlawanan Wilayah, Komunikasi Sosial, dan Bakti TNI berfungsi untuk :

1. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

2. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
4. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, merehabilitasi infra struktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.
5. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat.

Penggunaan Pembinaan Teritorial TNI AD diselenggarakan untuk membantu pemerintah pada masa damai, selama perang (pada tugas OMP), sesudah perang serta pada tugas OMSP yang bersifat tempur dan non tempur secara berdiri sendiri atau bersama dengan instansi terkait serta komponen bangsa lainnya yang implementasinya menggunakan metode Pembinaan Teritorial (Pembinaan Komunikasi sosial, Pembinaan Perlawanan wilayah dan Bakti TNI) berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Masa Damai.

Menyiapkan wilayah pertahanan aspek darat dan kekuatan pendukungnya secara dini untuk kepentingan pertahanan negara, membantu mengatasi kesulitan rakyat dan mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD, dengan sasaran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

- a. Terwujudnya ruang juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan berupa wilayah pertahanan aspek darat yang siap digunakan sebagai mandala perang atau mandala operasi, untuk memenangkan pertempuran di darat dalam rangka pertahanan negara yang diwujudkan dalam klasifikasi daerah dalam bentuk daerah tempur, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan untuk menuver satuan dan sebagai sarana persediaan logistik wilayah guna mendukung strategi pertahanan.
- b. Terwujudnya alat juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan berupa tersedianya komponen cadangan yang sudah terorganisir dan komponen pendukung secara nyata yang pengabdianya disesuaikan dengan profesi beserta segenap perangkatnya siap digunakan untuk kekuatan pengganda TNI AD yang perwujudannya melalui kegiatan bersifat fisik dan non fisik untuk kepentingan pertahanan negara.
- c. Terwujudnya kondisi juang yang tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga memiliki daya tangkal kewilayahan yang kuat dan mampu mendukung kepentingan pertahanan negara yang perwujudannya melalui berbagai

### 3. Sesudah Perang

Tujuan binter sesudah perang adalah menyiapkan kembali kekuatan pertahanan yang rusak akibat perang menjadi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman berikutnya, menyelenggarakan rehabilitasi wilayah, pengendalian kerusakan daerah dan mengembalikan kondisi juang masyarakat seperti semula dengan sasaran:

- a. Terwujudnya kembali ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman berikutnya.
- b. Terselenggaranya rehabilitasi wilayah dan pengendalian kerusakan daerah di wilayah.
- c. Terselenggaranya pengembalian kondisi juang masyarakat berupa semangat berbangsa dan bernegara, bela negara, persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air.

### 4. Pada Tugas OMSP

- a. Bersifat Tempur. Mengerahkan kekuatan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, mengatasi, menanggulangi, menjaga, mencegah dari kemungkinan bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- b. Bersifat Non Tempur. Mendukung dan memperlancar program pemerintah/otoritas sipil, membangun kesadaran masyarakat dari kemungkinan adanya niat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan atau meningkatnya eskalasi menjadi kerusuhan massa, serta menyelamatkan/ mengamankan/mencegah

berkembangnya kerugian jiwa dan harta benda untuk mengatasi kesulitan rakyat yang timbul akibat kecelakaan atau bencana alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat dengan sasaran :

- 1). Operasi militer selain perang yang bersifat tempur.
  - a) Pada operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata.
    - (1) Menghilangkan niat masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI.
    - (2) Terpisahnya gerakan separatis bersenjata dengan komponen masyarakat.
    - (3) Terputusnya hubungan komunikasi antara gerakan separatis di dalam negeri dan luar negeri.
    - (4) Melemahnya kekuatan gerakan separatis bersenjata.
    - (5) Hilangnya niat masyarakat untuk membantu atau memberikan informasi, dukungan logistik dan lain-lain kepada separatis bersenjata.
  - b) Pada operasi mengatasi pemberontakan bersenjata.
    - (1) Menghilangkan niat masyarakat untuk melaksanakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah.
    - (2) Terpisahnya pemberontakan bersenjata dengan komponen masyarakat.
    - (3) Terputusnya hubungan komunikasi antara pemberontakan bersenjata di dalam negeri.

- (4) Melemahnya kekuatan pemberontakan bersenjata.
  - (5) Hilangnya niat masyarakat untuk membantu atau memberikan informasi, dukungan logistik dan lain-lain kepada pemberontakan bersenjata.
- c) Pada operasi mengatasi aksi terorisme.
- (1) Menghilangkan niat masyarakat untuk melakukan tindakan terorisme.
  - (2) Terdeteksinya tempat, organisasi, kegiatan dan jaringan aksi teroris di seluruh wilayah.
  - (3) Hancurnya kekuatan dan alat peralatan jaringan aksi teroris.
  - (4) Terciptanya kepekaan masyarakat terhadap provokasi teroris serta kemampuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi TNI AD.
- d) Pada operasi mengamankan wilayah perbatasan.
- (1) Mantapnya stabilitas keamanan di wilayah perbatasan darat antar negara.
  - (2) Terjaganya batas wilayah di daerah perbatasan darat antar negara.
  - (3) Terjaganya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB) sepanjang garis perbatasan darat antar negara.

- (4) Mantapnya kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air disepanjang garis perbatasan antar negara.
  - e) Pada operasi mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
    - (1) Terwujudnya keamanan sekitar objek vital nasional yang bersifat strategis dari segala bentuk ancaman.
    - (2) Terwujudnya partisipasi komponen masyarakat disekitar objek vital dalam mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
  - f) Pada operasi melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Terwujudnya kepentingan perdamaian dunia guna menjaga keterlibatan internasional sesuai dengan resolusi PBB atau organisasi internasional lainnya guna mencegah berlanjutnya konflik, terjadinya pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran HAM, mencegah timbulnya korban rakyat sipil yang tidak berdosa atau tugas bantuan kemanusiaan.
- 2) Operasi militer selain perang yang bersifat non tempur.
    - a) Operasi Memberdayakan Wilayah Pertahanan dan Kekuatan Pendukungnya.
      - (1) Terwujudnya potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini yang meliputi

wilayah pertahanan di darat beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang.

(2) Terwujudnya pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Terwujudnya pemberdayaan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

(4) Terwujudnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan kemandirian kemanunggalan TNI AD dan Rakyat.

b) Operasi Membantu Pemerintahan di Daerah.

(1) Terselenggaranya program pemerintah dalam mengatasi kesulitan rakyat.

(2) Terselenggaranya program yang telah dibuat pemerintah/otoritas sipil.

(3) Terwujudnya kelancaran tatanan pemerintahan di daerah rawan.

c) Operasi Membantu Kepolisian Negara RI Dalam Rangka Tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Diatur Dalam Undang-undang. Terwujudnya pembinaan terhadap masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dalam konflik komunal, kerusuhan massa yang berskala tinggi, mencegah timbulnya korban jiwa dan harta benda, serta

- membantu pengamanan kegiatan yang berskala nasional dan internasional.
- d) Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian, dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan. Terselamatkan dan teramankannya masyarakat dari kerugian jiwa dan harta benda serta teratasinya kesulitan rakyat akibat kecelakaan atau bencana alam.
- e) Operasi Membantu Pencarian dan Pertolongan Dalam Kecelakaan (SAR). Terwujudnya keterpaduan satuan jajaran TNI AD dengan Pemda dan Instansi terkait serta komponen masyarakat secara terorganisir dalam rangka pencarian, pertolongan personel serta harta benda yang terjadi akibat kecelakaan (SAR).
- f) Operasi Membantu Pemerintah dalam Pengamanan Pelayaran dan Penerbangan terhadap Pembajakan, Perompakan dan Penyelundupan. Terwujudnya keterpaduan satuan jajaran TNI AD dengan Pemda dan Instansi terkait serta komponen masyarakat secara terorganisir dalam rangka mengamankan pelayaran, penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

#### 2.2.4 Kerangka Berfikir

Menurut sugiono (2010:48) bahwa kerangka berfikir bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka dari variabel yang akan di teliti. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis variabel yang di teliti.

Sebagai Satkowil Kodim 0204/Deli Serdang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam/Korem. Untuk mendukung tugas pokok Kodam dan Korem dapat berjalan secara maksimal maka Kodim 0204/DS harus meningkatkan kemampuan seluruh Apkowil yang ada di satuannya termasuk meningkatkan kemampuan Babinsa yang merupakan penentu keberhasilan pelaksanaan tugas TNI yang paling terdepan termasuk dapat membantu pemerintah di dalam mengurangi peredaran Narkoba yang marak terjadi di desa-desa termasuk di desa Rantau Panjang Kec Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

Adapun kerangka Berfikir tentang Peran Babinsa Kodim 0204/Deli Serdang Dalam mengurangi Narkoba di Desa Rantau Panjang Kec Pantai Labu Kab deli Serdang sebagai berikut :

**PERAN BABINSA DESA RANTAU PANJANG MENGURANGI  
PEREDARAN NARKOBA DI DESA RANTAU PANJANG KEC PANTAI LABU  
KAB DELI SERDANG**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Desa Rantau Panang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Dan penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan, pada bulan Januari-Maret 2020.

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa data secara induktif. Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagaimana yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, analisis ini lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, analisis ini lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, analisis ini dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik (Moleong, 2009:10).

Moleong (2009:6) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya untuk keperluan meneliti dengan dari segi prosesnya.

Moleong (2017:9) kembali menjelaskan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

### 3.3. Informan Penelitian

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut:

#### a. Informan Utama

Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini, informan utamanya adalah Danramil 23/Beringin, Babinsa Rantau Panjang.

#### b. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa Rantau Panjang, Kepala BNNK Deli Serdang.

### c. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Camat Pantai Labu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda di Desa Rantau Panjang.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik (Moleong, 2009:19) yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewe*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat *mendalam (indepth interview)*. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancaraannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya telah disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan

ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

## 2. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong, 2005:126). Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*).

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan :

- a. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung
- b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan menjadi sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang biasa.
- e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperthatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.

f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat (Moleong, 2009:126).

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik (Moleong, 2009:126). Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

#### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna (Sujana dalam Sujarweni, 2014)

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan memfokuskan ide-ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk

memberikan bantuan dan tema pada ide itu (Bogdan dan Taylor,2010:254) Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010:255) analisis data meliputi :

### 1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data –data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu – waktu diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan

dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

### 3.6. Definisi Operasional

Babinsa merupakan salah satu faktor terpenting sebagai penunjang keberhasilan Pembinaan Teritorial. Tugas utama dari Babinsa adalah sebagai Pembina desa yang meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan. Tanpa adanya Babinsa pembinaan teritorial tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Mengingat begitu pentingnya peran Babinsa maka perlu adanya peningkatan kualitas dari Babinsa melalui peningkatan dan pengembangan aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan maupun dengan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat bagaimana Peran Babinsa Kodim 0204/Deli Serdang dalam mengurangi peredaran Narkoba khususnya di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan.

1. Babinsa Desa Rantau Panjang telah melaksanakan perannya dengan baik dalam mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, hal ini dapat terlihat aktifnya Babinsa hadir di tengah masyarakat bersama kepala Desa, Babikantibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam mensosialisasikan bahaya Narkoba di Desa Rantau panjang dengan mengadakan penyuluhan kepada seluruh komponen masyarakat Rantau Panjang termasuk melakukan swifing ketempat –tempat yang dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi Narkoba di Desa Rantau Panang
2. Secara peran individu Babinsa Desa Rantau Panjang telah menjadi sosok individu yang baik di tengah masyarakat hal ini dapat dilihat dari kegiatan individu yang di lakukan babinsa dapat diterima oleh masyarakat rantau panjang dan Babinsa merupakan sosok pelopor bagi masyarakat dalam rangka mengurangi peredaran narkoba di Desa Rantau Panjang.
3. Babinsa Desa Rantau Panjang telah melaksanakan kemitraan dengan baik dengan Kepala Desa Rantau Panjang, Babinkantibmas dan unsur –unsur yang terkait di desa Rantau Panjang dalam mengurangi peredaran Narkoba di Desa rantau panjang dan hasilnya sepanjang tahun 2019 peredaran narkoba di

Desa rantau Panjang dapat berkurang secara kuantitas dan kesadaran masyarakat juga timbul untuk memerangi Narkoba di Desa rantau Panjang.

4. Babinsa Desa Rantau Panjang dalam mengajak masyarakat untuk mengurangi Narkoba di Rantau Panjang mengalami hambatan yang cukup sulit, dikarenakan banyaknya jalan-jalan tikus melalui laut yang di jadikan pengedar Narkoba untuk memasukkan Narkoba di Desa rantau panjang, begitu juga dengan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang Narkoba yang menghambat babinsa pada awal mengajak masyarakat mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang. Walaupun demikian dengan kegigihan Babinsa di bantu Kades dan Babinkantibmas serta tokoh masyarakat yang sadar perlunya menjaga anak keturunan mereka dari Narkoba dengan penyuluhan secara terus-menerus dan melaksanakan swifing ketempat yang dijadikan transaksi narkoba permasalahan di atas dapat teratasi.

## 5.2. Saran

1. Kemampuan babinsa harus terus ditingkatkan khususnya pengetahuan Babinsa tentang Narkoba, hal ini di karenakan Narkoba yang beredar saat ini memiliki variasi yang sangat banyak, tentunya Kodim 0204/Deli Serdang harus bekerjasama dengan BNNK Deli Serdang dan Poltabes Deli Serdang.
2. Perlu disiapkan lapangan pekerjaan bagi mantan narkoba yang sudah insaf untuk menafkahi kehidupan keluarganya, agar mereka tidak kembali lagi mengedarkan Narkoba.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/5/23

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Perkasad / 93 / XII / 2008. Buku petunjuk Pembinaan Tentang Binter. Bandung: Kodiklat AD

Perkasad / 29-02 / XII / 2012. *Bujuknik Binwanwil*. Bandung:Kodiklat AD

Perkasad / 36-02 / XII / 2012. *Bakti TNI*. Bandung:Kodiklat AD

Skep / 480 / XII / 2006. *Bujuknik Komsos*. Bandung:Kodiklat AD

Perkasad /28-02/XII/2012. *Bujuknik Sisrendal Binter* : Bandung Kodiklat AD.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Malong, Lexy J 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.

Narwoko, Dwi 2004. *Sosiologi*. Jakarta : Kencana

Veithzal, Rivai. 2004. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta : RajaGrafindo

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Persada

KBBI, 2000.

Gunawan, Adi, W. 2003. *Born To Be Genius*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Narwoko, Dwi 2004. *Sosiologi*. Jakarta : Kencana

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Persada

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2010. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Bogdan, Robert dan Steven J Taylor. 2010. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*.  
Surabaya: Usaha Nasional

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tahun tentang TNI

Undang –Undang Nomor 32 dan 33 Tahun. 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Majalah Kompas pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 tentang pengarahannya  
Presiden Jokowi tentang Darurat Narkoba

